

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KEPULAUAN
RIAU TAHUN 2010-2017**

Annisa Maisarah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Email : nisasarh16@gmail.com

ABSTRAK

Indeks pembangunan manusia adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), APBD Kesehatan (PK) dan APBD Pendidikan (PP). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Data Panel dan pendekatan *Error Component Model (ECM)*. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IPM. Berdasarkan hasil analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh bahwa variabel UMK dan APBD Pendidikan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap IPM dan APBD Kesehatan (PK) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM.

Kata kunci : IPM, Pertumbuhan Ekonomi, UMK, APBD Kesehatan, APBD Pendidikan.

ABSTRACT

The human development index is an indicator to measure success in efforts to build the quality of human life. This study aims to examine the effect of economic growth rates, district/city minimum wages, government spending in the field of health and government spending in the field of education on the human development index in Riau Island Province in 2010-2017. The variables uses in this study are Economic Growth (PE), District/City Minimum Wages (UMK), APBD Health (PK) and APBD Education (PP). The analysis used in this research is Data Panel Model and Error Component Model (ECM) approach. This approach aims to analyze the effect of IPM. Based on the results of the analysis used in this study, the UMK and APBD Education variables have a positive and significant influence on the HDI. While the Economic Growth (PE) variable has no significant positive effect on the HDI and APBD Health (PK) does not have a significant negative effect on HDI.

Keywords : HDI, Economic Growth, UMK, APBD Health, APBD Education.

PENDAHULUAN

Terkait dengan pembangunan SDM yang berkualitas, dikatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya *Human Development Indeks* (HDI) atau disebut juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Beberapa hal esensial dalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat,

berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak. (Pratowo dalam UNDP, 2011)

Ada suatu indikator yang diperkenalkan oleh UNDP yang bisa dipergunakan untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur yang disebut dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. $IPM < 50$ (rendah)
2. $50 \leq IPM < 80$ (sedang/menengah)
3. $IPM \geq 80$ (tinggi)

Tabel 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kepulauan Riau Periode Tahun 2010-2017

Wilayah	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kepulauan Riau	71.13	71.61	72.36	73.02	73.4	73.75	73.99	74.45
Karimun	66.4	66.82	67.67	68.52	68.72	69.21	69.84	70.26
Bintan	69.87	70.47	71.01	71.31	71.65	71.92	72.38	72.91
Natuna	66.29	67.76	68.8	69.39	70.06	70.87	71.23	71.52
Lingga	57.36	58.51	59.32	60.13	60.75	61.28	62.44	63.45
Kepulauan Anambas	63.03	63.71	64.32	64.86	65.12	65.86	66.3	67.06
Batam	76.98	77.82	78.39	78.65	79.13	79.34	79.79	80.26
Tanjungpinang	73.76	74.86	75.91	76.7	77.29	77.57	77.77	78

Sumber: BPS, Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan **Tabel 1.2**, angka IPM provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tabel diatas dilihat bahwa diantara kabupaten dan kota yang terdapat di Kepri angka IPM paling kecil ialah di Kabupaten Lingga. Dan yang paling tinggi angka IPMnya adalah Kota Batam, karena penyebaran penduduk sebesar 58,80 persen terkonsentrasi di Kota Batam atau sebanyak 1.094.579 jiwa. Serta Kota Batam merupakan Kota Industri.

TINJAUAN PUSTAKA

A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya "*Global Human Development Report*" memperkenalkan konsep "Pembangunan Manusia (*Human Development*)" sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia didefinisikan sebagai perluasan pilihan bagi manusia (*enlarging people's choices*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka.

B. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambung menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Todaro (2006:19) menyatakan, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar.

C. UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)

Pengertian upah adalah suatu imbalan yang diterima oleh seseorang buruh/karyawan dalam satu bulan berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, pabrik dan industri atau pun lainnya. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok yang di dalamnya termasuk tunjangan tetap. (Panorama & Lemiyana, 2017)

Penetapan kebijakan pada upah minimum di Indonesia berdasarkan standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang-undang No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja menetapkan upah minimum harus didasarkan dari standar kebutuhan hidup layak (KHL).

D. PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN

Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk terpenuhinya salah satu hak dasar masyarakat, yakni hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang tercantum pada UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Menurut Tjiptoherijanto, dilihat dari mutu manusia, yaitu dari sisi mutu kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Karena, aspek kesehatan mempengaruhi kualitas manusia. Jika terjadi kekurangan kalori, gizi, atau pun rendahnya derajat kesehatan bagi masyarakat maka akan pula mempengaruhi kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

E. PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Negara yang maju bisa dilihat dari tingginya tingkat pendidikan masyarakatnya karena tersedianya

pelayanan pendidikan yang menunjang dan memadai. Peranan dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khususnya yang dimiliki oleh sektor pendidikan. (Mauriza dkk, 2013)

METODOLOGI

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, internet, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan data *time series* yaitu periode tahun 2010-2017 sedangkan data *cross section* adalah 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Data yang diteliti meliputi : **(1)** Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2017. **(2)** Data Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2017. **(3)** Data Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2017. **(4)** Data Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2017. Model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1n} + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_{it}$$

Dimana :

Y_{it} = Variabel dependen, yaitu IPM

$\beta_0 - \beta_4$ = Koefisien

X_1 = Variabel laju pertumbuhan ekonomi

X_2 = Variabel upah minimum kabupaten/kota

X_3 = Variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan

X_4 = Variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan

I = Kabupaten/Kota

T = Tahun

E = *Disturbance error*

HASIL PENELITIAN

A. Uji *Chow*

Uji *Chow* dilakukan untuk menguji antara model *common effect* dan *fixed effect*. Berikut ini hasil pengujian dengan uji *Chow*.

Tabel 1.2

Hasil Uji Model Menggunakan Uji *Chow*

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	677.779301	(6,45)	0,0000
Cross-section Chi-square	252.835715	6	0,0000

Sumber: data sekunder diolah 2018

Pada hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F kurang dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ yang berarti signifikan dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$). Keputusan yang diambil pada pengujian dengan uji *Chow* ini yaitu tolak H_0 ($p\text{-value} < 0,05$) dengan hipotesis:

H_0 : maka digunakan model *common effect*

H_a : maka digunakan model *fixed effects* dan lanjut uji *Hausman*

Berdasarkan hasil dari uji *Chow*, maka model yang tepat adalah model *fixed effect*, dan dilanjutkan dengan uji *Hausman* untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau metode *random effect*.

B. Uji *Hausmann*

Hasil pengujian dengan uji *Hausmann* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

Hasil Uji Model Menggunakan Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq.d.f	Prob.
Cross-section random	5.617349	4	0.2296

Sumber: data sekunder diolah

Pada perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai probability pada *test cross section random effect* memperlihatkan angka bernilai 0,6615 yang berarti tidak signifikan dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$). Keputusan yang diambil pada pengujian *Hausman test* ini yaitu diterima H_0 ($p\text{-value} < 0,05$) dengan hipotesis:

H_0 : Model *random effect*

H_a : Model *fixed effect*

Berdasarkan hasil dari pengujian *Hausman Test*, maka metode pilihan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *random effect*.

C. Uji Heteroskedastisitas

Untuk permasalahan heteroskedastisitas dapat diatasi dengan menggunakan metode GLS (*Generalized Least Square*). Metode GLS telah diberikan perlakuan "*white heteroscedasticity-consistent covariance*" untuk mengantisipasi data yang tidak bersifat homokedastisitas. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji *White*

Uji	Chi-Sq. Statistik	Prob.
Obs*R-squared	18,05678	0,2042

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai $p\text{-value}$ lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Uji Multikolinieritas

Permasalahan multikolinieritas telah dapat terselesaikan ketika menggunakan data panel atau dengan kata lain data panel menjadi solusi jika data mengalami multikolinieritas (Gujarati, 2003). Berikut ini hasil pengujian multikolinieritas dengan korelasi parsial

Tabel 1.5

Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variable	Coefficeient Variance	VIF
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	0,203857	1,493918
UMK (X2)	20,85566	1,361675
APBD Kesehatan (X3)	10,93022	1,322873
APBD Pendidikan (X4)	4,194966	1,482972

Sumber: data sekunder diolah

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai VIF nilai kurang dari 10. Dengan demikian data panel dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah multikolinieritas.

E. Persamaan Regresi Data Panel

Tabel 1.6

Hasil Pengujian Regresi Data Panel *Random Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	0.145321	1.873727	0.0667
UMK (X2)	7.974947	14.27972	0.0000
APBD Kesehatan (X3)	-0.032514	-0.081563	0.9353
APBD Pendidikan (X4)	0.876003	2.498906	0.0157
Adjusted R square	0.841137		
F-statistik	73.80235		
Prob (F-statistik)			0,000000

Ket: *** = signifikan 1%; ** = signifikan 5%; * = signifikan 10%

Variabel dependen = Y

Berdasarkan pengujian pada pemilihan metode estimasi dengan pengujian *Hausman* dan pengujian *Chow*, diperoleh data bahwa metode yang tepat adalah

metode *Random effect*. Berikut ini hasil pengujian regresi data panel dengan *Random effect model*.

1. Pengujian Signifikansi Individual (uji t) :
 - a. Nilai t statistic X1 sebesar 1.873727 dengan signifikan 0.0667 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y dengan arah positif.
 - b. Nilai t statistic X2 sebesar 14.27972 dengan signifikan 0.0000 lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat pengaruh X2 terhadap Y dengan arah positif.
 - c. Nilai t statistic X3 sebesar -0.081563 dengan signifikan 0.9353 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y dengan arah negatif.
 - d. Nilai t statistic X4 sebesar 2.498906 dengan signifikan 0.0157 lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat pengaruh X4 terhadap Y dengan arah positif.

PEMBAHASAN

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak memiliki pengaruh signifikan positif dengan nilai koefisien sebesar 0.145321 dan nilai statistic sebesar 1.873727 terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Laju Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap indeks pembangunan manusia.

Permasalahan yang terjadi di Kepri sendiri adalah mengenai issue masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar individu/kelompok. Menurut data BPS Kepulauan Riau, angka Gini Ratio Kepri sangat fluktuatif dalam 3 tahun terakhir yaitu pada bulan Maret 2017 angka GR Kepri sebesar 0,334 (Ketimpangan kategori rendah) lalu naik sebesar 0,36 (Ketimpangan

kategori sedang) pada bulan September 2017, atau meningkat sebesar 7,5%. Ditelisik lebih jauh, ketimpangan terjadi diakibatkan daerah perkotaan.

Dengan adanya indikasi ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau akan berdampak terhadap masalah sosial. Ketidakseimbangan sosial ini akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dan dapat dilihat berarti bahwa, hanya sebagian masyarakat yang dapat menikmati hidup sejahtera dan sebagian kelompok masyarakat lainnya tidak memiliki hidup sejahtera. Disimpulkan bahwa, karena ketimpangan pendapatan yang terjadi sehingga tidak menyebabkan adanya pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

B. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 7.974947 terhadap indeks pembangunan manusia, maka jika terdapat kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 1 persen maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 7.974947 di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Chalid & Yusuf (2014) dan Herman (2018) yang menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Upah dimaksudkan agar dapat meningkatkan standar hidup manusia/pekerja dan sebagai upaya jaringan pengamanan sosial untuk memastikan agar upah itu sendiri tidak menurun, dan nantinya akan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Penetapan jumlah upah minimum agar buruh atau pekerja dapat memenuhi kebutuhannya secara minimal yaitu kebutuhan sandang, pangan dan keperluan rumah tangga. Nantinya, dari peningkatan upah minimum yang diterima buruh atau pekerja akan

meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dampaknya akan terjadi pada peningkatan IPM. (Zamharir, 2016)

C. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (PK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil penelitian maka dilihat bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (PK) tidak memiliki pengaruh signifikan negatif dengan nilai koefisien sebesar -0.032514 nilai statistic sebesar -0.081563 terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (PK) terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Laisina, Masinambow dan Rompas (2015) serta penelitian Kahang, Saleh dan Suharto (2016) yang menunjukkan bahwa variabel APBD Kesehatan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks pembangunan manusia.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki pulau-pulau kecil di dalamnya yang belum mampu dijangkau sepenuhnya oleh pelayanan kesehatan. Karena, pulau-pulau kecil tersebut memiliki karakteristik wilayahnya sebgaiian besar wilayah tertinggal dan terisolir. Sehingga, pemerintah Kepri masih kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Permasalahan lain di bidang pelayanan kesehatan adalah Standard Pelayanan Minimum (SPM) kesehatan yang tidak memperhitungkan biaya menuju ke lokasi. (Ginting, 2013)

Di Kepri pelayanan kesehatan pemerintah belum bisa maksimal dalam menjangkau masyarakat di pulau-pulau pedalaman atau terpencil. Terbatasnya alat transportasi laut menjadi salah satu kendala utama. Akses pelayanan kesehatan masih sulit dilakukan, terutama di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Apalagi jika sedang terjadi musim angin utara, tidak ada kapal yang bisa berlayar ke pulau-pulau karena kapal pompong rawan terbalik ombak, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinkes Kepri. (Sumber: Kompas.com)

D. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (PP) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil penelitian maka dilihat bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (PP) memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.876003 terhadap indeks pembangunan manusia, maka jika terdapat kenaikan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (PP) sebesar 1 persen maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0.876003 di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (PP) terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Baeti (2013) dan Maryani (2014) yang menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pendidikan menentukan kemampuan dalam menyerap serta mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan teknologi ataupun kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dimana pendidikan yang baik nantinya akan terjadi pemanfaatan teknologi menjadi mungkin terjadi serta pendidikan yang lebih luas merupakan modal manusia dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan menurut Meier dan Raunch. Menurut teori Rostow dan Musgrave ialah pandangan yang timbul melalui pengamatan pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak Negara tetapi tidak didasari oleh teori tertentu. Tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap ataukah terjadi secara simultan masih belum memiliki kejelasan. Sehingga pendidikan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hidup yang disebut dengan manfaat intristik. Yang nantinya pula, akan memberi peluang lebih besar bagi seseorang agar dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang disebut dengan manfaat instrumental. (Laisina dkk dalam Lanjouw dkk, 2015)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena, adanya ketimpangan pendapatan yang bias perkotaan sebesar 0,36 terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena, Pemerintah Kepri masih kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
4. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat memprioritaskan program-program pembangunan berbasis kerakyatan dalam pengentasan ketimpangan pendapatan di Kepri. Pemerintah juga mengerahkan keterlibatan pihak perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dan juga, penyaluran Dana Desa (DD) yang dilakukan pemerintah Kepri harus benar-benar dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kepulauan Riau ini.
2. Pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap kebijakan penetapan Upah Minimum yang didasarkan dengan kebutuhan hidup layak agar nantinya setiap peningkatan upah minimum yang terjadi akan semakin berdampak positif kepada meningkatnya daya beli masyarakat sehingga indeks pembangunan pun meningkat di Kepri.

3. Pemerintah melakukan penguatan kuantitas tenaga kesehatan melalui sistem kontrak dengan dokter/dokter gigi, bidan, perawat selain dari perekrutan melalui CPNS dan nantinya ditempatkan di setiap puskesmas di pulau-pulau kecil atau desa di Kepri.
4. Meningkatkan anggaran di sektor pendidikan agar infrastruktur dan kualitas pendidik meningkat pula dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kepri sehingga indeks pembangunan manusia dapat terus menerus meningkat nantinya

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. *INOVASI : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Volume 12, (2), 2016* , 192-217.
- Astri, Meylina, 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis*. Vol. 1 .No. 1 Tahun 2012.
- Astri , M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 1*, 77-102.
- Astuti, Maulida. 2018. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2014). *Pengantar Teori Ekonomi*. Yogyakarta: LOGO PENERBIT.
- Basuki, A.T. dan Yuliadi Imamudin. 2015. *Ekonometrika Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Mitra Pustaka Nurai (MATAN)

- Boediono, 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 1-12.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *JOM Fekon, Vol.4 No.1 (Februari) 2017 870* , 870-882
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. M. (2013). Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan Riau: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Politica Vol. 4, No. 1, Mei 2013* , 49-75.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar N. Dawn C. Porter. (2010). *Basic Econometrica*. Fifth Edition. New York : Mc Graw Hill.
- Gunawan, B. T., & Kurniawati, A. (2017). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Transisi Individu Dalam Pasar Kerja. *JOURNAL of RESEARCH in ECONOMICS and MANAGEMENT, Volume 17, No. 1, Januari - Juni* , 101-114.
- Internet: <http://www.id.undp.org>. Yang diakses pada hari Selasa, 19 Juli 2018.
- Internet: www.bps.go.id. Yang diakses pada hari Selasa, 19 Juli 2018.
- Internet: <https://kepri.bps.go.id/>. Yang diakses pada hari Senin, 26 Agustus 2018.
- Internet: <http://www.kemkes.go.id>. Yang diakses pada hari Senin, 26 Agustus 2018.

- Internet: www.kemendagri.go.id. Yang diakses pada hari Senin, 26 Agustus 2018.
- Internet: www.regional.kompas.com. Yang diakses pada hari Sabtu, 03 November 2018.
- Kahang, M., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Volume 18, (2), 2016* , 130-140.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Laisina, C., Masinambow, V., & Rompas, W. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 Tahun 2015* , 193-208.
- Lumbantoruan, Eka Pratiwi & Hidayat, Paidi. 2014. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi)". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 2 nomor 2*.
- Mauriza, S., Hamzah, A. B., & Syechalad, M. N. (2013). Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 1, No. 2, Mei 2013* , 29-43.
- Meylina, Astri. 2013. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis, Vol.1, No. 1, Maret 2013, ISSN: 2302 – 2663*.

- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Denni Sulistio Mirza / Economics Development Analysis Journal 1 (1) (2012)* , 1-15.
- Mulyaningsih, Yani. 2008. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pegurangan Kemiskinan” *Skripsi Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia*.
- Panorama, M., & Lemiyana. (2017). Pengaruh Upah minimum Kota (UMK) Terhadap Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Kota Palembang Tahun 2004-2014. *I-Finance Vol. 3. No. 2. Desember 2017* , 141-160.
- Prasetya, Ferry. 2012. Modul: Ekonomi Publik. “Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Pratowo, N. I. (2011). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia* , 15-31. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani (MATAN).
- Ranis, Gustav. et. al. 2000. Economic Growth and Human Development. **World Development** Vol.28,No.2,pp.197-219.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno. 2006. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Solow, Robert. 1956. *A Contribution to The Theory of Economic Growth*. *Quarterly Journal of Economics (The MIT Press)* 70 (1): 65–94.
- Tjiptoherijanto, P. 1989. *Untaian Pembangunan Sumberdaya Manusia*. FEUI. Jakarta.

- Todaro, Michael.P. 1994. *Ekonomi untuk negara berkembang*. Edisi ketiga, Jakarta : BUMI AKSARA
- Todaro, M. 2006. *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*. New York : Oxford University Press.
- United Nation Development Programme (UNDP).(1995). *The state of human development*. UNDP,NewYork (forth coming in September).
- Usmaliadanti, Christina. 2011. “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Yunitasari, Maria. 2007. “Analisis Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Timur”. *Skripsi*; Bogor, Program Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Zakaria, R. (2017). Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016.
- Zamharir, Amirul. 2016. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya.

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010-2017**


***THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN THE PROVINCE OF RIAU ISLANDS –
AN ANALYSIS OF AFFECTING FACTORS IN 2010-2017***




Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan di depan Dewan Penguji Program Studi Ilmu
Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tanggal 22 Oktober 2018

Yang terdiri dari

Dr. Nano Prawoto, S.E., M.Si
Ketua/Tim Penguji


Dr. Ayif Fathurrahman, S.E., M.Si
Anggota Tim Penguji


Ahmad Ma'ruf, S.E., M.Si
Anggota Tim Penguji

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Rizal Yawa, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA
NIK : 19731218199904 143 068